

Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kepemimpinan Transformasional, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Syariah (Studi Kasus Desa Tebba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone)

¹Ghina Raudatul Jannah, ²Andi Patimbangi, ³Masyhuri
¹Akuntansi Syariah, Intitut Agama Islam Negeri Bone, Watampone

E-mail: gina.raudatuljannah02@gmail.com, andipatimbangi85@gmail.com,
Masyhuri.akuntansi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat, kepemimpinan transformasional, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa perspektif syariah di Desa Tebba Kecamatan Salomekko. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis explanatory research. Populasi penelitian berjumlah 400 orang dengan sampel sebanyak 80 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai t hitung 14,986 dan signifikansi 0,000. Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t hitung 12,176 dan signifikansi 0,000. Kejelasan sasaran anggaran juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t hitung 23,680 dan signifikansi 0,000. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,888 menunjukkan bahwa 88,8% akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan 11,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, partisipasi masyarakat, kepemimpinan transformasional, dan kejelasan sasaran anggaran berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Kepemimpinan Transformasional, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of community participation, transformational leadership, and budget goal clarity on the accountability of village fund management from a sharia perspective in Tebba Village, Salomekko District. This research uses a quantitative approach with an explanatory research design. The population consists of 400 individuals, with a sample of 80 respondents selected using a simple random sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using SPSS software. The results show that community participation has a positive and significant effect on village fund management accountability, with a t-value of 14.986 and a significance level of 0.000. Transformational leadership also has a positive and significant effect, with a t-value of 12.176 and a significance level of 0.000. Budget goal clarity similarly has a positive and significant effect, with a t-value of 23.680 and a significance level of 0.000. The Adjusted R Square value of 0.888 indicates that 88.8% of village fund management

accountability is explained by the three variables, while the remaining 11.2% is influenced by other factors outside this study. Therefore, community participation, transformational leadership, and budget goal clarity play an important role in improving village fund management accountability in accordance with sharia principles.

Keywords: *Community Participation, Transformational Leadership, Budget Goal Clarity, Village Fund Management Accountability.*

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui program Dana Desa. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di tingkat lokal.

Dana Desa dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Melalui pengelolaan dana tersebut, diharapkan desa mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, menekan angka kemiskinan, memperkuat perekonomian lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa menuntut adanya prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan aspek akuntabilitas dan transparansi. Hal ini juga terlihat di Desa Tebba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone yang memperoleh alokasi Dana Desa sebesar Rp

686.642.000, yang terdiri atas Dana Desa sebesar Rp 540.116.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 146.526.000. Besarnya anggaran tersebut seharusnya mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai kendala dalam pengelolaannya.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme perencanaan dan pengelolaan anggaran, sehingga keterlibatan mereka dalam musyawarah desa masih terbatas. Selain itu, dalam beberapa kondisi, keterlibatan masyarakat hanya diwakilkan oleh anggota keluarga lain yang belum tentu sepenuhnya merepresentasikan aspirasi warga secara keseluruhan.

Di sisi lain, keterbatasan jangkauan aparat desa serta padatnya aktivitas administratif juga menjadi faktor yang memengaruhi kurang optimalnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini menyebabkan tidak semua wilayah dapat dijangkau secara maksimal, sehingga proses penyerapan aspirasi masyarakat belum berjalan secara merata. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat dengan program pembangunan yang direncanakan, karena tidak semua usulan dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran dan proses penentuan prioritas yang harus dilakukan secara selektif.

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan desa seperti amanah, transparansi, keadilan, etika, dan akuntabilitas masih belum

berjalan secara optimal. Padahal nilai-nilai tersebut memiliki peran penting dalam membangun tata kelola keuangan yang tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual sesuai dengan prinsip Islam.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan bagian dari konsep good governance yang menuntut adanya keterbukaan, tanggung jawab, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses pengelolaan anggaran. Dalam konteks ini, faktor partisipasi masyarakat, kepemimpinan, serta kejelasan sasaran anggaran menjadi elemen penting yang sangat berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, terlebih jika dikaitkan dengan perspektif syariah yang menekankan nilai amanah dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat, kepemimpinan transformasional, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam perspektif syariah, khususnya di Desa Tebba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.

2. LANDASAN TEORI

Partisipasi Masyarakat

Menurut Hassan, masyarakat merupakan sekumpulan individu yang saling terhubung dan saling memengaruhi dalam kehidupan sosial. Sementara itu, Tjokroamidjojo dalam Ndraha menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi, serta kebijakan pemerintah. Dengan demikian, partisipasi tidak hanya diartikan sebagai kehadiran, tetapi juga keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan publik.

Sherry Arnstein melalui konsep *A Ladder of Citizen Participation* menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki delapan tingkatan yang menggambarkan derajat keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Tingkatan tersebut dimulai dari manipulasi (manipulation) dan terapi (therapy) sebagai bentuk partisipasi semu, kemudian informasi (informing), konsultasi (consultation), dan penentraman (placation) sebagai bentuk partisipasi terbatas. Pada level yang lebih tinggi terdapat kemitraan (partnership), pendelegasian kekuasaan (delegated power), hingga kontrol warga (citizen control) sebagai bentuk partisipasi paling ideal di mana masyarakat memiliki kendali penuh terhadap kebijakan dan pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tebba, apakah masih berada pada tahap informasi dan konsultasi atau sudah mencapai tingkat kemitraan bahkan pendelegasian kewenangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa.

Dalam perspektif akuntansi syariah, partisipasi masyarakat yang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini karena keterlibatan aktif masyarakat dapat memperkuat transparansi, amanah, serta tanggung jawab dalam setiap proses pengelolaan Dana Desa.

Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan merupakan kemampuan individu dalam memengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Konsep kepemimpinan transformasional yang diperkenalkan oleh James MacGregor Burns menekankan bahwa pemimpin tidak hanya berfokus pada pertukaran kepentingan, tetapi juga pada upaya

meningkatkan motivasi, moral, dan kesadaran pengikut melalui hubungan yang saling menguatkan.

Dalam konteks pemerintahan desa, kepemimpinan transformasional dibutuhkan karena mampu mendorong perubahan, inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemimpin dengan gaya ini tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai penggerak perubahan yang memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun karakteristik kepemimpinan transformasional meliputi kemampuan memiliki visi jangka panjang, menjadi agen perubahan, berani mengambil keputusan, membangun kesadaran makna kerja, memberikan kepercayaan kepada bawahan, serta menanamkan motivasi yang tidak hanya bersifat material tetapi juga moral dan sosial. Selain itu, pemimpin juga menekankan nilai kejujuran, amanah, dan kerja sama dalam organisasi.

Dengan karakteristik tersebut, kepemimpinan transformasional dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa karena mendorong terciptanya sistem yang lebih terbuka, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Horngren, Foster, dan Datar, anggaran merupakan bentuk kuantitatif dari rencana kerja manajemen yang berfungsi sebagai alat koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Kejelasan sasaran anggaran mengacu pada tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu melalui penyusunan anggaran. Sasaran tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar seluruh proses penggunaan

dana dapat terarah sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Kejelasan sasaran anggaran juga berperan dalam membantu proses pengendalian, evaluasi, serta koordinasi antarbagian, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya sasaran yang jelas, organisasi dapat menilai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran serta memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penelitian di Desa Tebba, kejelasan sasaran anggaran menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berbasis syariah. Perencanaan anggaran yang disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan memiliki tujuan yang terukur akan mendorong terciptanya pengelolaan dana yang lebih tepat sasaran, transparan, serta sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan. Sebaliknya, apabila sasaran anggaran tidak dirumuskan secara jelas, maka berpotensi menurunkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Syariah

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas merupakan kewajiban individu maupun organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas yang diamanahkan, serta menunjukkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab atas setiap keputusan dan penggunaan sumber daya.

Dalam perspektif syariah, pengelolaan keuangan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga harus dikelola secara

adil, transparan, dan bebas dari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan aktivitas yang tidak sesuai syariah. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berbasis syariah tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga aspek moral dan spiritual dalam penggunaan dana agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif syariah menekankan pada tanggung jawab pengelola dalam memastikan bahwa setiap penggunaan dana dilakukan secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dana desa harus digunakan untuk kepentingan publik dan tidak boleh disalahgunakan, karena setiap pengelolaan harta dalam Islam merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT maupun kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan kejelasan sasaran anggaran. Partisipasi masyarakat berperan dalam meningkatkan pengawasan dan keterbukaan, kepemimpinan yang baik mendorong terciptanya tata kelola yang jujur dan bertanggung jawab, sedangkan sasaran anggaran yang jelas membantu memastikan bahwa penggunaan dana lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif syariah, akuntabilitas tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Konsep ini sejalan dengan *maqashid syariah* yang menekankan pada tercapainya keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, penerapan akuntabilitas berbasis syariah diharapkan mampu menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan, adil, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Adapun landasan hukum dari akuntabilitas keuangan syariah terdapat pada QS Al-Baqarah (2:188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis explanatory research yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen yaitu partisipasi masyarakat, kepemimpinan transformasional, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan Dana Desa perspektif syariah di Desa Tebba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone. Penelitian dilaksanakan di Desa Tebba dengan waktu penelitian selama enam bulan, yaitu Desember 2025 sampai Mei 2026. Desain penelitian yang digunakan adalah desain kausalitas, dimana hubungan antar variabel diuji berdasarkan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tebba yang berjumlah sekitar 400 orang dengan kriteria berdomisili minimal satu tahun, berusia minimal 17 tahun, dan pernah mengikuti kegiatan desa. Sampel penelitian berjumlah 80 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10 persen, dengan teknik pengambilan simple random sampling menggunakan bantuan aplikasi wheel of name. Variabel penelitian terdiri dari tiga variabel independen yaitu partisipasi masyarakat, kepemimpinan transformasional, dan kejelasan sasaran anggaran, serta satu variabel dependen

yaitu akuntabilitas pengelolaan Dana Desa perspektif syariah, yang diukur menggunakan skala Likert.

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada responden, kemudian dianalisis menggunakan SPSS melalui

- a) Uji Validitas: Validitas berasal dari kata "*validity*" yang berarti sejauh mana suatu alat ukur benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur oleh peneliti. Jika nilai korelasinya signifikan pada taraf 0,05, maka item tersebut dianggap valid. Ini berarti item tersebut memiliki peran penting dalam menggambarkan keseluruhan isi dari variabel yang sedang diteliti, sehingga layak untuk digunakan dalam pengumpulan data penelitian
- b) Uji Reliabilitas: Reliabilitas atau keandalan suatu instrumen menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut mampu memberikan hasil yang konsisten dan stabil dalam setiap pengukuran. Jika suatu alat ukur menghasilkan data yang berbeda-beda dalam kondisi yang seharusnya sama, maka instrumen itu dianggap tidak reliabel.
- c) Uji normalitas: data yang diperoleh dari sampel penelitian harus menyebar secara merata dan mengikuti pola distribusi yang seimbang, di mana sebagian besar nilai berada di sekitar nilai rata-rata. Bentuk distribusi ini dikenal sebagai kurva lonceng (*bell-shaped curve*) yang simetris, artinya data tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Bila data tidak menunjukkan distribusi normal, maka hasil analisis statistik bisa saja keliru, karena tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
- d) Uji heteroskedastisitas: Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variasi (varian) dari nilai *residual* antar satu pengamatan dengan pengamatan lainnya.
- e) Uji multikolinearitas: Uji multikolinearitas merupakan salah satu langkah penting dalam analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang sangat kuat atau hampir pasti antar variabel bebas (*independen*) dalam suatu model.
- f) Uji autokorelasi: Gejala autokorelasi muncul ketika terjadi hubungan atau keterkaitan antara satu data dengan data lainnya dalam satu rangkaian pengamatan, baik yang tersusun berdasarkan waktu (seperti pada data runtun waktu/*time series*) maupun berdasarkan lokasi atau wilayah (seperti pada data lintas tempat/*cross-sectional*).
- g) uji t: Uji t digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Artinya, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah satu variabel bebas tertentu memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variabel tak bebas.
- h) uji F: Uji F bertujuan untuk menilai pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini menjadi penting dalam konteks regresi linear berganda karena memungkinkan peneliti mengetahui apakah keseluruhan model memiliki hubungan yang signifikan antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%.

- i) Uji koefisien determinasi (R^2): Koefisien determinasi, yang dikenal sebagai *R-square* (R^2), berfungsi untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Secara keseluruhan, penelitian ini dilakukan mulai dari perumusan masalah, penyusunan instrumen, penentuan sampel, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis statistik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Tebba adalah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Pemerintahan Wilayah Desa Tebba Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone membawahi 2 dusun yaitu dusun bulu sele dan bola lohe. Jarak dengan ibukota kabupaten yaitu 66,7 kilometer. Pusat Pemerintahan Desa Tebba kecamatan Salomekko kabupaten bone Terletak di dusun Bulu Sele.

Rincian Penyebaran Data

Tabel 1 Rincian Penyebaran Data

No	keterangan	jumlah	presentasi
1	Jumlah kuesioner yang di sebar	80	100%
2	Jumlah kuesioner yang kembali	80	100%
3	Jumlah kuesioner	0	0%

yang tidak kembali

4	Jumlah kuesioner yang bisa diolah	80	100%
---	-----------------------------------	----	------

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa, kuesioner yang disebar sejumlah 80 kuesioner, kuesioner yang kembali sebanyak 80 kuesioner dengan demikian, sehingga tingkat pengembalian yang diperoleh adalah sebesar 100%, maka jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 80 kuesioner dan dapat diolah dengan baik.

Identitas Responden Berdasarkan Kedudukan di desa

Tabel 2 Identitas Responden

No	Kedudukan Di Desa	Frekuensi	Presentase
1	Aparat Desa	15	18%
2	Tokoh Masyarakat	10	13%
3	Masyarakat	55	69%
	<i>Jumlah</i>	<i>80</i>	<i>100%</i>

Berdasarkan tabel 2, Identitas Responden berdasarkan Lama tinggal di desa, Dapat diketahui bahwa sebagian besar responden adalah Masyarakat sebanyak 55 orang atau 69%, kemudian disusul dengan aparat desa sebanyak 15 orang atau 18%, dan yang terakhir adalah tokoh Masyarakat sebanyak 10 orang atau 13% .

Uji instrumen penelitian Uji validitas

Tabel 3 hasil uji validitas

Variabel	Indikator	Pernyataan	R Hitung	><	R Tabel	Ket
(X1)	partispasi masyarakat	X1.1.1	0,847	>	0,22	valid
		X1.1.2	0,861	>	0,22	Valid
	X1.2	X1.2.1	0,881	>	0,22	Valid
		X1.2.2	0,875	>	0,22	Valid
	X1.3	X1.3.1	0,908	>	0,22	Valid
		X1.3.2	0,872	>	0,22	Valid
	X1.4	X1.4.1	0,924	>	0,22	Valid
		X1.4.2	0,855	>	0,22	Valid
(X2)	Kepemimpinan transformasional	X2.1.1	0,885	>	0,22	Valid
		X2.1.2	0,918	>	0,22	Valid
	X2.2	X2.2.1	0,915	>	0,22	Valid
		X2.2.2	0,936	>	0,22	Valid
	X2.3	X2.3.1	0,916	>	0,22	Valid
		X2.3.2	0,921	>	0,22	Valid
	X2.4	X2.4.1	0,917	>	0,22	Valid
		X2.4.2	0,922	>	0,22	Valid
(X3)	Kejelasan sasaran anggaran	X3.1.1	0,885	>	0,22	Valid
		X3.1.2	0,858	>	0,22	Valid
	X3.2	X3.2.1	0,864	>	0,22	Valid
		X3.2.2	0,917	>	0,22	Valid
	X3.3	X3.3.1	0,93	>	0,22	Valid
		X3.3.2	0,935	>	0,22	Valid
	X3.4	X3.4.1	0,908	>	0,22	Valid
		X3.4.2	0,895	>	0,22	Valid
(Y)	akuntabilitas pengelolaan dana desa	Y1.1.1	0,937	>	0,22	Valid
		Y1.1.2	0,937	>	0,22	Valid
	Y1.2	Y1.2.1	0,94	>	0,22	Valid
		Y1.2.2	0,941	>	0,22	Valid
	Y1.3	Y1.3.1	0,941	>	0,22	Valid
		Y1.3.2	0,901	>	0,22	Valid

Berdasarkan tabel 3 Uji validitas instrumen dilakukan menggunakan korelasi Product Moment Pearson dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Nilai r tabel sebesar 0,220 diperoleh berdasarkan jumlah responden sebanyak 80 orang dengan derajat kebebasan ($df = N - 2$, yaitu 78. Berdasarkan tabel r Product Moment pada $df = 78$ dan pengujian dua arah (two-tailed), diperoleh nilai r tabel sebesar 0,2199 yang dibulatkan menjadi 0,220. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Partisipasi Masyarakat (X1), Kepemimpinan Transformasional (X2), Kejelasan Sasaran Anggaran (X3), dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) memiliki nilai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel (0,220). Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap item pernyataan mampu mengukur konstruk yang diteliti sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut secara akurat dan dapat dipercaya.

Uji Reliabilitas

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefesien Realibilitas	Nilia Batas Crombachs	Ket.
Partisipasi Masyarakat (X1)	0,957	0,60	Reliabel
Kepemimpinan Transformasional (X2)	0,973	0,60	Reliabel

Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	0,966	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,970	0,60	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4, variabel Partisipasi Masyarakat (X1), Kepemimpinan Transformasional (X2), Kejelasan Sasaran Anggaran (X3), dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) memperoleh nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,60. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel karena memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dalam mengukur variabel yang diteliti.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

ONE-SAMPLE KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST		
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98082889
Most Extreme Differences	Absolute	.98
	Positive	.073
	Negatif	-.098
Test Statistics		.098
Asymp. Sig. (2-Tailed)		.056 ^c

Hasil uji normalitas pada tabel 5 dengan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,056 (>0,05). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa data residual

berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi dan model dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Uji Heterokedasitas

Tabel 6 Hasil Uji Hetekodastisitas

COEFFICIENTS ^a						
Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	V1	.016	.085	.021	.184	.853
	V2	.019	.098	.022	.193	.848
	V3	.184	.099	.212	1.856	.067

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 6 menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat, Kepemimpinan Transformasional, dan Kejelasan Sasaran Anggaran masing-masing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,853, 0,848, dan 0,067. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Multikolonieritas

Table 7 Hasil Uji Multikolonieritas

COEFFICIENTS ^a		
Variabel	tolerance	VIF
Partisipasi Masyarakat (X1)	0,967	1,034
Kepemimpinan Transformasional	0,960	1,042

(X2)

Kejelasan 0,959 1,046

Sasaran

Anggaran

(X3)

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 7 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi, sehingga model memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Autokorelasi

Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate	Durbin Watson
1	0,945	0,892	0,888	1,455	2.168

Berasarkan Hasil uji autokorelasi pada tabel 8, dengan menggunakan Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 2,168. Nilai tersebut berada pada rentang 1,5–2,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi. Dengan demikian, model telah memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9 Hasil Uji Parsial (T)

Model	Unstandar Dized Coeffi Cients	Standar Dized Coeffi Cients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
1 Partisi Pasi Masya Rakat	0,669	0,045	0,862	14,986 0,000
Kepe Mim Pinan Trans Forma Sional	0,584	0,048	0,809	12,176 0,000
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,771	0,033	0,937	23,680 0,000

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa:

1. Variabel Partisipasi Masyarakat memiliki nilai t-hitung sebesar 14,986 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Variabel Kepemimpinan Transformasional memiliki nilai t-hitung sebesar 12,176 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
3. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki nilai t-hitung sebesar 23,680 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Uji simultan (F)**Tabel 10 Hasil Uji Simultan (F)**

ANNOVA ^a					
Model	Sum Of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.331.137	3	443.712	209.698	.000 ^b
Residual	160.813	76	2.116		
Total	1.491.950	79			

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa Nilai F hitung sebesar 209,698 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga H₀ ditolak dan H_a diterima. Artinya, secara simultan variabel Partisipasi Masyarakat (X₁), Kepemimpinan Transformasional (X₂), dan Kejelasan Sasaran Anggaran (X₃) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

Uji Koefisien Determinasi**Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

MODEL SUMMARY				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimated
1	.945 ^a	.892	.888	145.463

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa Nilai Adjusted R Square sebesar 0,888 (88,8%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat, Kepemimpinan Transformasional, dan Kejelasan Sasaran Anggaran memberikan pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 88,8%, sedangkan sisanya sebesar 11,2%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan**Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat memiliki hubungan positif karena memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,669. Nilai t hitung untuk variabel Partisipasi Masyarakat sebesar 14,986. Nilai t hitung (14,986) lebih besar dari t tabel (1,992) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga H₀ ditolak dan H_a diterima. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut teori *A Ladder of Citizen Participation* yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein, partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya partisipasi yang aktif, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas sosial terhadap penggunaan dana desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Irnawati (2022) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan

demikian, semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Kepemimpinan Transformasional memiliki hubungan positif karena memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,584. Nilai t hitung untuk variabel Kepemimpinan Transformasional sebesar 12,176. Nilai t hitung (12,176) lebih besar dari t tabel (1,992) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan pemimpin dalam memberikan arahan, motivasi, dan membangun komunikasi yang efektif, maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kondisi di Desa Tebba menunjukkan bahwa peran pemimpin desa berkontribusi dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, terarah, dan bertanggung jawab. Menurut teori kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh Bernard M. Bass, pemimpin yang mampu menginspirasi dan membangun komitmen bawahan akan meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam perspektif Islam, hal tersebut sejalan dengan prinsip amanah yang menekankan tanggung jawab dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad Yasir dan Wilda Sri Munawaroh (2023) yang menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional berperan penting dalam

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki hubungan positif karena memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,771. Nilai t hitung untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar 23,680. Nilai t hitung (23,680) lebih besar dari t tabel (1,992) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jelas dan terukur sasaran anggaran yang ditetapkan, maka semakin baik pula proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel. Kondisi di Desa Tebba menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran membantu pemerintah desa dalam menentukan prioritas program, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dalam perspektif teori kejelasan sasaran anggaran, tujuan anggaran yang disusun secara spesifik dan terukur akan memudahkan pelaksanaan serta evaluasi kinerja. Selain itu, dalam perspektif Islam, kondisi tersebut mencerminkan prinsip transparansi melalui keterbukaan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Luh Komang Purnama Sari, Kadek Dewi Padnyawati, dan Rai Dwi Andaya W (2024) yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, kejelasan sasaran anggaran menjadi faktor

penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat, Kepemimpinan Transformasional, dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tebba. Partisipasi masyarakat mendorong peningkatan pengawasan sosial dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kepemimpinan transformasional berperan dalam meningkatkan komitmen, koordinasi, dan tanggung jawab aparatur desa, sedangkan kejelasan sasaran anggaran mendukung pelaksanaan program yang lebih terarah, transparan, dan mudah dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta memperkuat penerapan nilai etika, amanah, dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Tebba, aparatur desa, tokoh masyarakat, serta seluruh responden yang telah bersedia memberikan informasi dan berpartisipasi dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, bapak Dr. Andi Patimbangi, S.Pd., M.Pd, dan bapak Masyhuri, S.E.,M.Ak serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta bantuan selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afriansyah et al., *Pemberdayaan Masyarakat*, 4th ed. (sumatra barat: Pt Global

Eksekutif Teknologi, 2023). 1st ed. (sumatra barat: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023). h 26-27

“Al-Quran Kemenag Republik Indonesia Dan Terjemahannya,” n.d.

Bahar Agus Setiawan and Abd Muhith, *Transformasional Ladership: Ilustrasi Di Bidang Organisasi Pendidikan*, 2nd ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020). 2nd ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020). h 22-24

Bambang Kurniawan et al., “Pengaruh Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Mekar Jaya Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah ...* 2, no. 2 (2024): 395–409.

Dr. Wendy Sepmady Hutahaean, *Filsafat Dan Teori Kepemimpinan*, 1st ed. (Malang: Ahlimedia Press, 2021). h 1-4

Kementerian Keuangan, “Data Anggaran Di Setiap Desa,” *Jurnal Jendral Keuangan RI* 1, no. 1 (2025):h 652–676.

Laurence Money, Henry Midgley, and Pasquale Ruggiero, “Regulation Space in Local Government Audit: An International Comparative Study of 20 Countries,” *Jurnal Public Money & Management* 43, no. 3 (2022): 233–41,

<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09540962.2022.2129559>.

Luh komang purnama Sari, kadek dewi Padnyawati, and Rai dwi andayani W, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi 2024*, no. April (2024): h 158–167.

Lukman Adi Santoso et al., *Buku Pintar Dana Desa*, 2nd ed. (Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2019),

<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09540962.2022.2129559>. h 1-12

- Muhammad Abbas and Raza Ali, "Transformasional Versus Transactional Leadership Styles and Project Succes," *Jurnal European Mangement Journal* 41, no. 1 (2023): 125-42.
- Money, Midgley, and Ruggiero, "Regulation Space in Local Government Audit: An International Comprative Study of 20 Coutries."
- Nila Ayu Kusuma Wardani et al., "The Influence of Community Participation, Use of Information Technology, and Apparatus Competence on Village Fund Management Accountability," *Jurnal Sharia Accounting Perspective* 9, no. 3 (2023): 60-77.
- Rahma Ramadhani, and Nuraini Sri Bina, *Statistik Penelitian Pendidikan*. 1st ed. Jakarta: KENCANA, 2021.
- Resty Febrianti and Dewi Amalia, "Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2024): 256-63, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13624433>.
- Simon Sumanjoyo Hutagalung, *Partisipasi Dan Pemberdayaan Di Sektor Publik*, 1st ed. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022). h 9-14
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 19th ed. (Bandung: ALFABETA, CV, 2017). h 9-60
- Toni Nasution M.Pd, Sahlan M. Pd, and Ramadani Lubis M. Si, *Studi Masyarakat Sosial*, 1st ed. (sumatra barat: Cv azka pustaka, 2023). h 1-16